



# LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)  
PENGELOLAAN KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**TAHUN 2022**



## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Kota Blitar tahun 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Selama tahun anggaran 2022, permohonan informasi publik melalui aplikasi sistem informasi PPID Kota Blitar telah diupayakan agar dapat memenuhi hak publik.

Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumberdaya, aplikasi sistem informasi, hingga anggaran yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini.

Penulis mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga dengan dukungan Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* Pemerintah Kota Blitar dapat meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Blitar, 26 Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
selaku  
PPID Pemerintah Kota Blitar



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR-E-BSSN



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Gambar.....	2
Daftar Tabel .....	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022.....	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 .....	6
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022. .....	9
BAB IV Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 .....	11
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	12
LAMPIRAN.....	14

## Daftar Gambar

Gambar 1 Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat .....	19
Gambar 2 Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat .....	19
Gambar 3 Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 .....	20
Gambar 4 Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 .....	20

## Daftar Tabel

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik Periode Bulan Januari – Desember 2022.....	10
Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022.....	18

**BAB I**  
**Gambaran Umum**  
**Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**  
**Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022**

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala pkjcolfdzdroses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Kota Blitar pertama kali di tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, terdapat empat kali perubahan susunan yang telah disesuaikan dengan perubahan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan penataan kelembagaan sehingga ada perubahan nama dan struktur organisasi pada badan, dinas dan kantor. PPID Utama saat itu berada di Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata (Dinas Kominpar). Di tahun berikutnya, melalui SK Walikota Nomor 188/814/HK/410.010.2/2015 telah disesuaikan keberadaan PPID Utama Pemerintah Kota Blitar yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Perubahan kelembagaan yang berlaku per-Oktober 2014 tersebut juga mempengaruhi jumlah PPID Pembantu dari seluruh SKPD jika dibandingkan dengan tatanan sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2017 terdapat penyesuaian PPID Utama dan PPID Pembantu yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga PPID utama berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pengelolaan Informasi Publik didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Tahun berikutnya terbit Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Setiap Badan Publik diwajibkan membentuk PLID Pembantu, menyediakan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), menyediakan Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik (RIDP) dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi.

Pembaruan kebijakan pelayanan informasi publik terbaru saat ini dihadirkan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun proses penyelenggaraan PPID Kota Blitar belum

disesuaikan dengan perkembangan kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Kota Blitar mengalami penurunan indeks Keterbukaan Informasi Publiknya.

Hasil Monev PPID Pemerintah Kota Blitar yang mengalami penurunan beberapa hal disebabkan karena banyak data yang belum diperbaharui dan sudah tidak relevan lagi, seperti profil badan publik yang tercantum dalam situs belum di *update* hingga beberapa link situs yang dicantumkan pada SAQ tidak sesuai dengan poin indikator yang tercantum dalam SAQ tersebut.

Berdasarkan penilaian ini, Pemerintah Kota Blitar menyadari sangat diperlukan adanya perbaikan menyeluruh dan penyegaran pada keseluruhan aspek pendukung layanan informasi publik. Penyesuaian kebijakan, pedoman, hingga struktur PPID Utama dan PPID Pelaksana Kota Blitar akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan demi mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

**BAB II**  
**Gambaran Umum**  
**Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**  
**Tahun 2022**

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Utama dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik dengan Luas ruang pelayanan berukuran 5x8 m<sup>2</sup>, terdiri dari:

1. Formulir:
  - a. Permohonan Informasi Publik;
  - b. Register Permohonan Informasi Publik;
  - c. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
  - d. Formulir Pernyataan Keberatan;
  - e. Register Pernyataan Keberatan.
2. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);
3. Dokumen lainnya, meliputi:
  - a. Profil PPID Pemkot Blitar;
  - b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik;
  - c. Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik;
  - d. Rekapitulasi Akses Informasi per-Dokumen Publik.
4. Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya;
5. Layanan informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan sampai dengan tanggapan akan keberatan;

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Utama Kota Blitar yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jl. DR. Moh. Hatta no. 05, Kel. Sentul, Kecamatan

Kepanjenkidul, Kota Blitar, 66113. Layanan informasi disediakan untuk masyarakat yang datang langsung sesuai hari dan jam kerja di Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik Kota Blitar pada Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kota Blitar. Adapun detail hari dan jam pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : 07.00 s/d 15.00 WIB
- Jumat : 07.00 s/d 14.30 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat pk. 12.00 s/d 13.00 WIB. Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan antara lain, situs laman <http://blitarkota.go.id> dan <http://ppid.blitarkota.go.id>. Selain itu juga dapat mengirimkan via email [ppid@blitarkota.go.id](mailto:ppid@blitarkota.go.id), telepon 0342 – 807805, Fax 0342 – 807805, dan SMS Gateway 0857 1878 1708.

## B. Sumber Daya Manusia

PPID Utama Kota Blitar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Pelaksana.

## C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, masuk dalam Program Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan

Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 151.500.471.

## **BAB III**

### **Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022**

#### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi PPID Utama maupun PPID Pembantu/Pelaksana. Terlebih dengan adanya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar melalui PPID Utama mengadakan dan mengikuti kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat**

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Desember 2022 di Ruang Integrated System Center Diskominfotik Kota Blitar. Sosialisasi diikuti oleh dengan peserta PPID Pelaksana pada OPD se-Kota Blitar.

##### **2. Menghadiri Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Kota Malang tanggal 22 April 2022.**

#### **B. Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Selama tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar melalui PPID Utama telah menerima sebanyak 126 permohonan melalui pengunduhan Informasi Publik. Permohonan informasi tersebut paling banyak didapatkan pada bulan November sebanyak 43 permohonan dan paling sedikit pada bulan Januari 2022 sebanyak dua permohonan. Rekapitulasi permohonan melalui pengunduhan informasi publik:

**Rekapitulasi Permohonan melalui  
Pengunduhan Informasi Publik  
Periode Bulan Januari – Desember 2022**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>
Januari	2
Februari	3
Maret	3
April	9
Mei	10
Juni	4
Juli	7
Agustus	5
September	7
Oktober	10
November	43
Desember	23

*Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan melalui Pengunduhan Informasi Publik Periode Bulan Januari – Desember 2022*

**C. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Pada Tahun 2022, tidak ada pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID maupun mengajukan permohonan melalui email. Permohonan semua melalui pengunduhan informasi publik yang ada di website. Sehingga hal ini menunjukkan dari 126 pemohon melalui pengunduhan semua dapat terlayani atau dikabulkan.

**D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

- Nihil

## **BAB IV**

### **Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022**

Beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan pelayanan informasi publik di PPID Kota Blitar selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana.
2. Belum adanya penyesuaian terhadap regulasi baru, yaitu Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sehingga pedoman, SOP, dan regulasi PPID tingkat Kota sudah harus dikaji kembali
3. Belum adanya penekanan tugas pokok fungsi dalam pengelolaan informasi publik, sehingga permohonan informasi hanya dipusatkan di PPID Utama, belum tersebar di PPID Pelaksana.
4. PPID Pelaksana sebagai representasi Badan Publik yang menguasai data, pada umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang bersifat terbuka dan Informasi yang Dikecualikan.

## **BAB V**

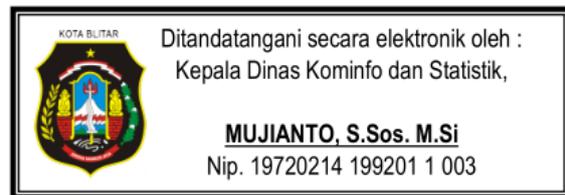
### **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan Kota Blitar, baik secara daring atau tatap muka;
2. Membuat Keputusan Walikota Blitar, pedoman, SOP dan regulasi PPID lainnya yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar agar pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bisa berjalan lebih optimal;
4. Mengkoordinir PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang bersifat terbuka dan Informasi yang Dikecualikan, dan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali untuk dilakukan *update*.
5. Secara berkala meng*update* informasi yang disajikan melalui website maupun media sosial

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kota Blitar.

Blitar, 26 Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
selaku  
PPID Pemerintah Kota Blitar



*Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR-E-BSSN*

**Lampiran**  
**Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022**

No	Dokumen	Jumlah
1	Perda Kota Blitar No 10 Tahun 2017 Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Beserta Lampiran). (Peraturan Daerah)	24
2	Perwali No. 62 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, tata Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Peraturan Walikota)	5
3	Perda No. 1 Tahun 2017 Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Peraturan Daerah)	5
4	Perda No. 8 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Peraturan Daerah)	5
5	Perda No. 7 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Peraturan Daerah)	4
6	Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Peraturan Walikota)	2
7	Perwali No. 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (Peraturan Walikota)	2
8	Perwali No. 49 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peraturan Walikota)	2
9	Dokumen Perencanaan Pembangunan	2
10	Perda No. 12 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 - 2030 (Peraturan Daerah)	2
11	Renstra Dinas Pendidikan Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	2
12	Renstra Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	2

13	Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 2016 - 2021(Rencana Strategis)	2
14	Perda No. 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Blitar (Peraturan Daerah)	2
15	Perda No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Peraturan Daerah)	2
16	SPJ Penerimaan Januari – Maret 2017 SPJ Penerimaan Januari – Maret 2017 (SPJ Penerimaan)	1
17	LKjIP Pemerintah Kota Blitar 2016 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Blitar Tahun 2016 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1
18	LKj IP_KOTA_BLITAR_2018 LKj IP_KOTA_BLITAR_2018 (Laporan Auntabilitas dan Kinerja Pemerintah)	1
19	RPJMD Pemerintah Kota Blitar 2016 - 2021 Perrubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Perubahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)	1
20	RKA - Dinas Komunikasi Informatika dan Pariwisata Daerah - 2012 (Ringkasan RKA - SKPD)	1
21	Data pembangunan (Aplikasi layanan publik dan dokumen perencanaan pembangunan/rencana kerja wali kota 2022)	1
22	Perda APBD Kota Blitar - 2020 Perda APBD Kota Blitar - 2020 (Perda APBD)	1
23	Perda No. 12 Tahun 2017 Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan Daerah)	1
24	Data Pembangunan Dan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1
25	Data Informasi Layanan Publik	1
26	1. Data Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar tahun 2017-2021	1
27	Perda APBD Kota Blitar - 2019 Perda APBD Kota Blitar - 2019 (Perda APBD)	1
28	Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 (Catatan Atas Laporan Keuangan)	1
29	Perubahan Rencana Strategis Diskominfotik Th 2016 - 2021 Kota Blitar (Rencana Strategis)	1

30	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016-2021 Kota Blitar (Rencana Strategis)	1
31	SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021 SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SK tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)	1
32	CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2021 CaLK Pemerintah Daerah (Catatan Atas Laporan Keuangan)	1
33	Krmrk	1
34	AHSP Kota Blitar tahun 2022	1
35	Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017 (Rencana Kerja)	1
36	neraca tahun 2019 neraca tahun 2019 (Neraca)	1
37	Perda No. 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Kearsipan (Peraturan Daerah)	1
38	Perda No. 10 Tahun 2008 Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Peraturan Daerah)	1
39	Perda No. 4 Tahun 2017 Pengelolaan Sampah (Peraturan Daerah)	1
40	Data jumlah UMKM Kota Blitar 5 tahun terakhir dan data pendapatan UMKM Kota Blitar 5 tahun terakhir	1
41	Perwali No. 7 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja, Vihara, Pasbaman, Kelentheng) Modin Kematian Dan Juru Kunci Makam Di Kota Blitar tanggal 3 Januari 2017 (Peraturan Walikota)	1
42	Kota Blitar 2010 - 2014 (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)	1
43	RPJMD Kota Blitar 2011 - 2015 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)	1
44	Renstra Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
45	Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
46	Renstra Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
47	Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1

48	Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
49	Renstra Kantor Pengelola Pasar Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
50	Renstra Kantor Kas Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
51	RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 (Rencana Kerja)	1
52	RENJA SKPD PEMERINTAH KOTA BLITAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja)	1
53	Review Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2011-2015 (Rencana Strategis)	1
54	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2015 (Rencana Strategis)	1
55	Renja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2015 (Rencana Kerja)	1
56	Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015 (Rencana Kerja)	1
57	Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 (Rencana Kerja)	1
58	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 (Rencana Kerja)	1
59	Review Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2011-2015 (Rencana Strategis)	1
60	Rencana Aksi Tahun 2017 Dinas Pendidikan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2017 Dinas Pendidikan (Rencana Aksi)	1
61	Rencana Aksi Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rencana Aksi)	1
62	Rencana Aksi Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Rencana Aksi)	1
63	RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 Perubahan (Rencana Kerja)	1
64	RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2017 (Rencana Kerja)	1
65	Analisis Monitoring Media Ancaman Teroris	1

66	Pengoptimalan Peran Masyarakat Cegah ISIS Siaran Pers No: 01/Humas/VIII/2014 Selasa, 12 Agustus 2014 pk.13.00 wib (Pers Rilis)	1
67	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saranan Prasaranan Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yang Dibiayai Dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saranan Prasaranan Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Yang Dibiayai Dan Tambahan (Peraturan Walikota)	1
68	Perwali No. 18 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Peraturan Walikota)	1
69	Perda No. 3 Tahun 2011 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Blitar (Peraturan Daerah)	1
70	Perda No. 8 Tahun 2007 Susunan Organisasi Dan Tatakerja Kelurahan Kota Blitar (Peraturan Daerah)	1
71	Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2021 - 2026 (Rencana Strategis)	1
72	Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2022 (Rencana Kerja)	1
73	Rencana Aksi Tahun 2017 Kecamatan Kepanjen Kidul Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2017 Kecamatan Kepanjen Kidul (Rencana Aksi)	1
74	SOP Administrasi Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2015 (Standar Operational Procedure)	1
75	Peringatan Dini Bencana Peringatan Dini Bencana (Prosedur Peringatan Dini)	1
76	Perda No. 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Peraturan Daerah)	1
77	Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 (Rencana Kerja)	1
78	Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 - 2026 (Rencana Strategis)	1
Total		126

*Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022*

## Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

1. Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat  
Blitar, 19 Desember 2022 di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar



*Gambar 1 Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat*



*Gambar 2 Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat*

2. Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Kota Malang, 22 April 2022



*Gambar 3 Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021*



*Gambar 4 Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021*



KOTA BLITAR

# PPID DISKOMINFOTIK KOTA BLITAR